

Pentingnya *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lakey Di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu

Nadia Sabrina¹, Rahmad Hidayat², Ilham Zitri³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram
nadiaa34482@gmail.com¹, rahmad_dayat22@yahoo.com², ilham.zitri@ummat.ac.id³

Abstract

Lakey Beach is known as one of the world-class surfing destinations with great potential to enhance the local economy. However, the management of this area requires the synergy of various parties to ensure sustainability and maximize benefits for the community. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the development of tourism destinations at Lakey Beach, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies. The findings indicate that the involvement of key actors such as local government, tourism business actors, local communities, and NGOs plays a crucial role in the collaborative process. Although cooperation has occurred, challenges such as cross-sector coordination, information gaps, and conflicting interests remain.

Keywords:

*Collaborative Governance
Lakey Beach
Tourism Development*

Abstrak

Pantai Lakey dikenal sebagai salah satu destinasi selancar kelas dunia yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal. Namun, pengelolaan kawasan ini memerlukan sinergi berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Lakey, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, dan LSM berperan penting dalam proses kolaboratif tersebut. Meski telah terjadi kerja sama, tantangan seperti koordinasi lintas sektor, kesenjangan informasi, dan kepentingan yang berbeda masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas komunikasi antar aktor serta penyusunan regulasi yang mendukung kolaborasi berkelanjutan guna mengoptimalkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan Pantai Lakey.

Corresponding Author:

Nadia Sabrina
Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: nadiaa34482@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan favorit bagi wisatawan domestik maupun internasional. Dengan beragam destinasi wisata yang menarik, Indonesia menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan pengembangan sektor pariwisata, mengingat pariwisata merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan asli daerah (APBD). Indonesia memiliki potensi besar dalam keberagaman pariwisatanya. Sebagai salah satu sektor industri terbesar di dunia, pariwisata memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Dengan pengelolaan yang baik, sektor pariwisata dapat berkontribusi dalam mendorong pembangunan, menciptakan peluang usaha baru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemasukan daerah (Ardiansyah et al., 2023)

Pariwisata memiliki peran penting bagi suatu negara. Keberadaan pariwisata memberikan peluang bagi pemerintah daerah tempat objek wisata berada untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas wisata tersebut. Selain itu, pariwisata menjadi kebutuhan bagi setiap individu, karena kegiatan wisata dapat meningkatkan kreativitas, mengatasi kejenuhan kerja, memberikan relaksasi, mendukung aktivitas berbelanja dan bisnis, memperluas pengetahuan tentang sejarah serta budaya suatu etnis, menjaga kesehatan, dan memenuhi kebutuhan spiritual. Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa "pariwisata dapat menjadi alat pengembangan yang signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi sumber ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan, serta menciptakan hubungan saling mendukung dengan sektor produksi dan jasa lainnya. Selain itu, pariwisata diyakini mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, baik di tingkat global maupun lokal, dengan meningkatkan devisa, pendapatan asli daerah, serta pendapatan masyarakat lokal. Manfaat-manfaat ini menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan menyeluruh. Untuk mewujudkan hal tersebut, kolaborasi dan kemitraan antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya, sangat penting untuk mendukung kelangsungan pembangunan pariwisata (Pajriyah & Sulaeman, 2021).

Pariwisata menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati oleh banyak orang saat ini. Sebagai aktivitas penting, pariwisata telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di negara maju dan sebagian kecil masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia, pariwisata sangat diminati oleh banyak orang. Tingginya antusiasme masyarakat untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata, serta pesatnya perkembangan industri pariwisata, menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber pendapatan strategis bagi negara (Trisniati et al., 2022)

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disebabkan oleh peran strategis pariwisata dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Secara umum, peran pariwisata dalam pembangunan meliputi tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi (melalui devisa dan pajak), aspek kerja sama internasional (membangun hubungan persahabatan antarbangsa), serta aspek budaya (memperkenalkan budaya Indonesia kepada wisatawan mancanegara). Pengembangan dan pemanfaatan pariwisata secara maksimal dapat meningkatkan kualitas kawasan wisata, sehingga mampu menarik minat wisatawan. Tujuan pengembangan kawasan wisata ini adalah untuk mempercantik tempat wisata tanpa mengganggu ekosistem alami yang ada. Pengelolaan yang efektif dan strategi pemasaran yang tepat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkenalkan kawasan wisata kepada masyarakat. Pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif pihak swasta dan masyarakat. Kolaborasi semacam ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata. Dalam kerangka kerja sama atau *collaborative governance*, para aktor kebijakan dapat saling melengkapi untuk mengoptimalkan proses implementasi kebijakan. Pariwisata yang dikembangkan secara maksimal dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah ekonomi yang masih dihadapi negara-negara berkembang dengan populasi besar, termasuk Indonesia. Upaya pengembangan sektor ini bertujuan untuk memenuhi harapan wisatawan agar mereka merasa puas selama kunjungannya. Kepuasan ini diharapkan mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung di masa mendatang atau setidaknya membagikan pengalamannya kepada orang lain. Konsep-konsep pengembangan pariwisata dapat disesuaikan dengan karakteristik lokasi, serta ketersediaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) (Akbar et al., 2022).

Konsep *collaborative governance* muncul dalam era paradigma *governance*, di mana dinamika masyarakat semakin maju sehingga pemerintah dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks. Karena keterbatasan dalam mengatasi tantangan ini secara mandiri, pemerintah perlu menjalin kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal. Perkembangan tata kelola pemerintahan menjadikan *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaboratif) sebagai fenomena sekaligus tren baru yang menarik untuk diteliti, seperti yang disampaikan oleh Ansell dan Gash. *Collaborative governance* merupakan salah satu pendekatan untuk merespons keinginan para pemangku kepentingan agar terlibat dalam proses pembangunan, sekaligus

menjawab keterbatasan anggaran sektor pariwisata di NTB maupun Indonesia secara umum. Keterbatasan anggaran ini membuat pemerintah kesulitan memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja yang lebih baik. Tujuan dari pendekatan ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan harapan mereka. Tata kelola kolaboratif adalah suatu kerangka kerja pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak secara konstruktif, melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, serta ruang publik, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sasaran publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Konsep ini mencakup kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas. Tata kelola kolaboratif merupakan proses dan struktur dalam manajemen serta perumusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level secara konstruktif, baik dari instansi pemerintah, lembaga publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil, untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diraih secara individu. Proses ini bersifat kolektif dan egaliter, di mana setiap peserta memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses tersebut (Putra et al., 2022)

Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan beragam destinasi wisata menakjubkan, mulai dari pantai berpasir putih yang memesona, gunung berapi yang megah, hingga desa-desa tradisional yang masih alami. Dengan keindahan alam yang luar biasa, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya, NTB semakin diminati sebagai tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun internasional. Salah satu destinasi wisata menarik di Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah Pantai Loang Baloq. Pantai ini terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Menurut Kurniansah dan Hali (2018), Pantai Loang Baloq menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara historis, nama "Loang Baloq" berasal dari keberadaan makam atau petilasan di wilayah timur pantai. Makam tersebut merupakan tempat peristirahatan seorang penyebar agama Islam di Pulau Lombok, yaitu Syekh Gauz Abdurrazak, yang berasal dari Timur Tengah (Hidayat & Pratama, 2023).

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan NTB

No.	Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1.	2020	40.814	582.012	622.826
2.	2021	11.890	952.146	964.036
3.	2022	126.539	1.249.756	1.376.295
4.	2023	678.378	1.441.549	2.119.927

Sumber Data : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, 2024

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey pada tahun 2020 mencapai 14.714 orang. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 10.573 wisatawan. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah wisatawan meningkat menjadi 11.750 orang, dan berdasarkan data terbaru pada tahun 2023, kunjungan wisatawan kembali mengalami peningkatan signifikan dengan total 28.450 wisatawan.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Pantai Lakey Tahun 2020 -2023

No.	Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca negara	Jumlah
1.	2020	11693	3021	14714
2.	2021	8111	2462	10573
3.	2022	10746	1004	11750
4.	2023	24075	4375	28450

Sumber Data : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, 2024

Menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Lakey pada tahun 2020 mencapai 14.714 orang. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan dengan jumlah kunjungan sebanyak 10.573 wisatawan. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah wisatawan meningkat menjadi 11.750 orang, dan berdasarkan data terbaru pada tahun 2023, kunjungan wisatawan kembali mengalami peningkatan signifikan dengan total 28.450 wisatawan.

Pengelolaan pariwisata di Pantai Lakey, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, perlu dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang lebih berfokus pada peningkatan kualitas dibandingkan kuantitas. Meski demikian, pengembangan wisata di Pantai Lakey masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena

pelaksanaan kolaborasi yang belum berjalan optimal sebagai bagian dari pengelolaan destinasi wisata (Citriadin et al., 2020).

Selain itu, meskipun fasilitas di Pantai Lakey sudah tersedia, pengelolaannya masih belum maksimal. Beberapa masalah utama mencakup kondisi fasilitas yang tidak memadai, seperti menara pengawas di tengah laut yang kondisinya sangat memprihatinkan, lapuk, dan berisiko roboh, sehingga dapat membahayakan para peselancar. Akses jalan menuju pantai juga masih belum diperbaiki, area parkir kurang memadai, dan fasilitas umum seperti toilet masih terbatas. Masalah lain yang mencolok adalah banyaknya sampah yang berserakan di kawasan Pantai Lakey, akibat minimnya tempat penampungan sampah sementara serta kurangnya perhatian dari pemerintah, pelaku usaha, wisatawan, maupun masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini turut memperburuk kondisi kawasan pantai dan menciptakan kesan negatif. Permasalahan tersebut menyebabkan berkurangnya kenyamanan wisatawan. Jika dibiarkan, hal ini dapat membentuk persepsi buruk terhadap Pantai Lakey sebagai destinasi wisata. Persepsi negatif ini pada akhirnya akan berdampak pada penurunan minat wisatawan untuk berkunjung, yang dapat menghambat perkembangan pariwisata di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan cepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, melalui penerapan konsep *collaborative governance*.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian (Ali, 2022). Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang suatu permasalahan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau studi dokumen dapat memberikan informasi mendetail mengenai persepsi, makna, dan pengalaman individu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan penelitian untuk memperoleh data secara valid, akuntabel, dan maksimal dengan menyeluruh serta tujuan untuk memaparkan bagaimana pentingnya *collaborative governance* dalam pengembangan wisata pantai Lakey. penelitian ini telah dilakukan di destinasi pantai Lakey bertempat di kecamatan Hu'u kabupaten Dompu berlangsung pada bulan Januari 2025. Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi destinasi pantai Lakey untuk melihat bagaimana pelaksanaan tata Kelola kolaboratif yang diterapkan baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pengembangan wisata pantai Lakey. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap bagaimana bentuk *collaborative governance* yang diterapkan oleh pemerintah dalam pengembangan wisata pantai Lakey serta tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Bersama dalam pengembangan wisata pantai Lakey terkait dengan infrastruktur dan fasilitas publik yang masih kurang memadai. Wawancara telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam tata Kelola kolaboratif, seperti, pemerintah, swasta, masyarakat, dan pokdarwis. Pada saat melakukan wawancara peneliti melakukan kunjungan pertama di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Dompu, bertemu langsung dengan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Dompu dan sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Dompu, di mana proses wawancara ini berbincang terkait bagaimana proses tata kolaboratif pemerintah terhadap pengembangan wisata pantai Lakey. kemudian kegiatan wawancara selanjutnya mengunjungi ketua pokdarwis Desa Hu'u dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar tata Kelola pengembangan wisata pantai Lakey, dan sejauh mana proses kolaboratif yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan wisata pantai Lakey sama halnya dengan pokdarwis peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan ketua *association* hotel pantai Lakey serta masyarakat lokal Desa Hu'u mengenai bagaimana bentuk *collaborative governance* yang dijalankan dalam pengembangan wisata pantai Lakey kecamatan Hu'u kabupaten Dompu apa yang menjadi hambatan atau tantangan dalam proses pengembangan wisata pantai Lakey terkait dengan fasilitas atau kebersihan pantai Lakey sehingga dalam proses pengembangan wisata pantai Lakey bukan hanya pemerintah saja yang terlibat melainkan semua pihak yang ada di sekitar pantai Lakey.

3. PEMBAHASAN

Pantai Lakey berada di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) Salah satu destinasi yang terkenal di kalangan peselancar internasional adalah Pantai Lakey. Tidak banyak yang menyangka bahwa salah satu wilayah di Kabupaten Dompu ini menyimpan potensi wisata bahari kelas dunia. Meski popularitas Pantai Lakey di kalangan wisatawan domestik masih terbatas mungkin karena lokasinya yang jarang dikunjungi atau aksesnya yang cukup menantang pantai ini telah menjadi tujuan utama para peselancar dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan wisata Pantai Lakey di Kecamatan

Hu'u, Kabupaten Dompu, sudah mulai menggunakan pendekatan *collaborative governance* atau kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kerja sama ini belum berjalan maksimal karena masih banyak tantangan yang dihadapi. *Collaborative governance* adalah bentuk tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks pengembangan wisata Pantai Lakey, *collaborative governance* dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, maupun pokdarwis untuk memaksimalkan potensi pengembangan wisata pantai Lakey.

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan konsep operasional yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun konsep operasional yang digunakan melihat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Pantai Lakey kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu mengacu pada teori ansel and gash 2008 tentang 4 indikator keberhasilan *collaborative governance*, yaitu Kondisi Awal, Pemimpin Fasilitatif, Desain Lembaga, Proses Kolaboratif.

1. Kondisi Awal

Pada tahap awal, Pantai Lakey punya potensi besar sebagai objek wisata kelas dunia, terutama karena ombaknya yang unik dan alamnya yang masih alami. Sayangnya, infrastruktur seperti jalan, toilet umum, dan fasilitas umum lainnya masih belum memadai, sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan. Oleh karena itu keterlibatan stakeholder merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan wisata, tetapi dapat dilihat pada kondisi awal pengembangan wisata pantai Lakey dari tahun ke tahun, untuk tahun sekarang cukup baik dibanding



Gambar di atas menunjukkan adanya peran dan kontribusi dari pemerintah atau stakeholder lainnya dalam memperbaiki jalan, walaupun belum maksimal, Tetapi menunjukkan adanya kolaborasi dalam memperbaiki infrastruktur jalan guna sangat penting agar pengunjung tidak kesulitan dalam perjalanan menuju wisata pantai Lakey, selain itu dalam perjalanan menuju wisata pun akan disambut dengan keindahan patung *surfing* menunjukkan identitas dari wisata pantai Lakey.

2. Pemimpin Fasilitatif

Dari sisi kepemimpinan, pemerintah daerah sudah ikut aktif dalam mendorong kolaborasi. Pemerintah memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung dan memfasilitasi anggaran, mengembangkan fasilitas-fasilitas publik serta membantu mempromosi wisata pantai Lakey agar terkenal lebih luas belum informasi yang didapatkan wisatawan dalam mengunjungi wisata pantai Lakey. Sebagai Pemimpin Fasilitatif berperan sebagai penghubung yang mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan mulai dari Membangun Kepercayaan dan Kemitraan Menjalinkan hubungan erat antara pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi non-pemerintah.

Adapun keterlibatan berbagai pihak Pemerintah provinsi pemerintah daerah dinas pariwisata pemerintah desa pokdarwis swasta masyarakat lokal, Kerja sama dalam Keterlibatan pengembangan wisata pantai Lakey sudah masuk pada Kawasan strategi Provinsi (KSP) sehingga tanggung jawab tidak seutuhnya tugas pemerintah Kabupaten Dompu saja, di mana pemerintah daerah mendukung serta memfasilitasi dana untuk pengembangan wisata dalam hal ini juga menjadi tanggung jawab dan tugas bersama yaitu pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Asosiasi hotel Lakey dan masyarakat lokal, mereka berkewajiban untuk mengembangkan destinasi wisata pantai Lakey

3. Desain Lembaga

Pengembangan wisata pantai Lakey, yang terletak didesa Hu'u kecamatan Hu'u, bisa melibatkan kebijakan pemerintah yang bersifat kolaboratif antara sektor publik dan swasta, serta melibatkan berbagai

lembaga dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut. Beberapa pendekatan umum yang mungkin diterapkan melalui desain lembaga dalam pengembangan wisata pantai Lakey antara lain:

1. Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan wisata pantai, seperti menyediakan infrastruktur yang memadai (jalan, fasilitas umum, dsb.).
2. Desain Lembaga Pengelola Destinasi
Pembentukan lembaga atau badan pengelola khusus untuk pantai Lakey yang akan bertugas mengatur berbagai aspek seperti perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengawasan kegiatan wisata.
3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Kebijakan yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata. Hal ini bisa melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk mengelola akomodasi, dan layanan terkait.
4. Promosi dan Pemasaran
Kebijakan yang mendukung promosi wisata pantai Lakey, baik melalui kampanye digital maupun *event* internasional Lembaga seperti Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat memainkan peran penting dalam pemasaran dan menarik wisatawan.

Jadi dalam Pengembangan wisata Pantai Lakey melibatkan semua pihak dengan menggunakan konsep desain lembaga biasanya bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan menggunakan Konsep desain lembaga dalam pengembangan pariwisata melibatkan kerja sama antara Pemerintah provinsi NTB, Daerah, desa, Membuat regulasi yang mendukung, menyediakan infrastruktur dasar, dan memfasilitasi investasi.

4. Proses Kolaboratif

Forum-forum kerja sama seperti musyawarah dan rapat sudah ada, tapi belum semua pihak yang terlibat benar-benar aktif. Akibatnya, keputusan bersama sulit dicapai, dan tanggung jawab antar pihak juga belum jelas. Proses kerja sama sendiri masih terbatas. Komunikasi antar pihak belum lancar, kepercayaan belum sepenuhnya terbentuk, dan komitmen kadang tidak konsisten. Pemerintah masih jadi pihak yang paling dominan, sementara masyarakat dan pelaku usaha lebih banyak menunggu arahan.



Pengembangan wisata Pantai Lakey melalui pendekatan kolaboratif telah menunjukkan kemajuan positif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal, dan sektor swasta. Dialog tatap muka menjadi sarana utama dalam komunikasi dan koordinasi, meskipun belum semua pihak dapat terlibat secara optimal akibat berbagai kendala. Kepercayaan antaraktor mulai terbentuk, dengan masing-masing pihak menjalankan perannya, baik sebagai pengambil kebijakan, pengelola, maupun pelaksana di lapangan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum adanya kesepakatan tertulis atau visi-misi bersama yang mengikat seluruh pihak dalam kolaborasi jangka panjang. Komitmen yang ada masih bersifat koordinatif tanpa strategi terpadu yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat secara penuh. Sementara pemahaman bersama tentang pentingnya pengelolaan wisata berbasis kolaborasi telah mulai terbentuk, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara sektor pariwisata, lingkungan, dan ekonomi agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut memberikan Dampak positif dari pengelolaan yang lebih baik terlihat dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan lainnya.

Dampak Positif Dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan wisata pantai Lakey ini antara lain adalah:

1. Membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk komunitas lokal atau penduduk sekitar
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh masyarakat setempat.
3. Dengan semakin di kembangkannya lokasi pariwisata ini, maka dapat mendorong peningkatan pembangunan daerah sekitar dan tersedianya fasilitas umum yang semakin banyak, seperti penginapan, minimarket, dan lain-lain.
4. Dengan adanya wisatawan asing, akan memungkinkan terciptanya pertukaran budaya dari wisatawan dengan masyarakat setempat, sehingga membuat para wisatawan mengerti tentang budaya setempat dan mengerti akan nilai-nilai dari tradisi masyarakat setempat begitu pula sebaliknya.

Dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan industri pariwisata Pantai Lakey salah satunya adalah peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata merupakan sumber dana pembangunan tersebut seperti tersedianya jalur perjalanan yang lancar, melalui jalur darat. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan fasilitas pendukung dan diversifikasi atraksi wisata. Adapun Dampak negatif Dengan dikembangkannya wisata Pantai Lakey, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain yaitu:

- 1) Apabila suatu obyek wisata terlalu padat, maka bias menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk setempat
- 2) Dengan semakin banyaknya pengunjung, terkadang membuat lingkungan semakin kotor, karena terlalu banyak sampah.
- 3) Pencampuran budaya yang dibawa oleh wisatawan asing, terkadang tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga sering sekali terjadi penyimpangan perilaku masyarakat.

Pengembangan wisata Pantai Lakey memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah wisatawan, pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, serta pertukaran budaya yang memperkaya pemahaman antarbudaya. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti berkurangnya kenyamanan warga lokal akibat kepadatan wisatawan, peningkatan pencemaran lingkungan, serta potensi penyimpangan norma akibat percampuran budaya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar manfaat pariwisata dapat dimaksimalkan dan dampak negatifnya diminimalisir.

Tabel 1.3 Aktivitas/ Kegiatan Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Pantai Lakey

No	Aktor	Aktivitas / kegiatan
1.	Pemerintah	Mendukung dan Memfasilitasi anggaran dalam perbaikan infrastruktur. Membangun fasilitas- fasilitas publik seperti mushola, toilet, area parkir. Ikut andil dalam mempromosi wisata melalui sosial media dan situs resmi untuk memperluas jangkauan informasi kepada wisatawan.
2.	Swasta	Memfasilitasi penginapan berupa hotel-hotel. Membantu promosi wisata dengan melalui sosial media seperti youtube dan sosial media. Lainnya.
3.	Masyarakat	Aktivitas masyarakat lokal yaitu mengelola fasilitas yang sudah disediakan yaitu menyewa papan surfing serta menjadi pemandu surfing. Menyediakan restoran/ rumah makan khas dari bima-dompu. Perberdayaan ekonomi kreatif seperti pembuatan karya khas bima-dompu yaitu muna pa'a dan tembe nggoli memperkenalkan ke wisata budaya unik yang dimiliki oleh bima-dompu dalam mempromosikan pengembangan wisata pantai Lakey.

Hambatan-hambatan *collaborative governance* pengembangan wisata pantai Lakey

Dalam proses kolaborasi pengembangan wisata pantai Lakey tentu saja memiliki hambatan-hambatan yang dihadapi oleh berbagai pihak pemangku kepentingan, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pengembangan wisata pantai Lakey. Seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum terlatih secara profesional, kurangnya anggaran, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta

lemahnya daya saing Pantai Lakey dibandingkan dengan tempat wisata terkenal lain seperti Bali atau Lombok.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut Bentuk *Collaborative Governance* menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat lokal sehingga dapat dilihat dari Peran dan kontribusi pemerintah mendukung, memfasilitasi anggaran dan perbaikan infrastruktur, ikut andil dalam mempromosi wisata serta mengembangkan fasilitas-fasilitas publik di wisata pantai Lakey. Peran dan kontribusi swasta dalam investasi fasilitas penginapan dan promosi wisata dalam bentuk pengembangan wisata Pantai Lakey. Serta peran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan fasilitas wisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta mempromosi kuliner khas Bima-Dompu dalam bentuk pengembangan wisata pantai Lakey.

Dalam pendekatan *Collaborative Governance* ini menggunakan empat (4) indikator utama, yaitu:

- Kondisi Awal: Pantai Lakey memiliki potensi besar namun fasilitas dan infrastrukturnya sangat terbatas. Seiring waktu, keterlibatan berbagai pihak mulai terlihat dalam pembangunan jalan, peningkatan fasilitas umum, serta pengelolaan kebersihan oleh Pokdarwis.
- Pemimpin Fasilitatif: Kepemimpinan yang efektif telah mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Pemimpin fasilitatif berperan dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, serta menjembatani kepentingan berbagai pihak.
- Desain Lembaga: Pengembangan wisata Pantai Lakey melibatkan peraturan dan kebijakan yang kolaboratif, termasuk peran penting Pokdarwis dan asosiasi hotel dalam pengelolaan wisata. Desain kelembagaan yang baik memastikan keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan.
- Proses Kolaboratif: Dialog tatap muka dan komunikasi yang transparan menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam forum musyawarah dan pengambilan keputusan telah dilakukan meski belum optimal.

Faktor Penghambat:

- Keterbatasan sumber daya, baik dari segi infrastruktur maupun pendanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam hal keterampilan dan profesionalisme di sektor pariwisata.
- Sifat egoisme di antara pemangku kepentingan menyebabkan kurangnya sinergi dalam pengelolaan wisata, yang berdampak pada lambatnya perkembangan destinasi.
- Diperlukan strategi kolaboratif yang lebih efektif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar pengembangan wisata Pantai Lakey dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

REFERENSI

- Ananda Muhamad Tri Utama (2022). *collaborative pengembangan wisata pantai*. 9, 356–363.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ali, M. Makhrus. "Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya dalam penelitian." *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 1.2 (2022): 1-5.
- Ali, M. M. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dan penerapannya dalam penelitian. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(2), 1-5.SS.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi *Journal of Public Policy*.
- Asurah, W., & Wibawani, S. (2023). Collaborative Governance Pengembangan Objek Wisata Air Embung "Bandung Bondowoso" Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 167. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3206>
- Citriadin, Y., Marliana, Y., & Ayu Kurniawati, K. R. (2020). Pengelolaan Kolaborasi Kepariwisata Alam di Kabupaten Dompu. *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.36765/jpmb.v3i1.219>
- Ehtika, D. T. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya. *Kajian Hukum*, 1(2), 133–158.
- Fitrullah, M., Karini, N. M. O., & Mahadewi, N. P. E. (2018). Karakteristik Dan Motivasi Wisatawan Mancanegara. *Jurnal IPTA*, 6(1), 135–147.
- Hidayat, R., Abdurrahman, A., & Rizaldi, W. (2023). Penambahan Pemikiran Dalam Perencanaan Pengembangan Objek Wisata Hiu Paus Di Labuhan Jambu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian*

- Publik (JP-Publik)*, 2(2), 55. <https://doi.org/10.31764/jp-publik.v2i2.13036>
- Hidayat, R., & Pratama, I. N. (2023). Kolaborasi Multi Stakeholder Dalam Menjaga Destinasi Wisata Pantai Loang Baloq. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(3), 431–438. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i3.2474>
- Jailani, M. A., Toyo, T. R., Mataram, U. M., Baloq, P. L., Sekarbela, K., & Barat, N. T. (2024). *Penilaian Pengembangan Objek Wisata Untuk Meningkatkan Jumlah Pengunjung Di Pantai Loang Baloq*. 8(9), 6–13.
- Kurniansah, R. (2016). Persepsi Dan Ekspektasi Wisatawan Terhadap Komponen Destinasi Wisata Lakey-Hu'u, Kabupaten Dompu. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 3, 72–91. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2016.v03.i01.p06>
- Mekarise, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Mustamin, M., Hidayat, R., & Alfian, Y. (2020). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat). *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(2), 387. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i2.2794>
- Pratama, H., Neni, N., & Supriatna, U. (2020). Pengaruh Pariwisata Situs Gunung Padang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur. *Jurnal Geografi*, 3(1), 9–21.
- Pratama, I. N. (2023). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Purnama, I., & Aryani, F. (2019). Strategi Promosi Terhadap Pengembangan Pantai Lakey Sebagai Destinasi Wisata Berbasis Bahasa Inggris. *Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam*, 8(1), 92.
- Ratatotok, K., & Tongkotow, N. F. (2021). *Jurnal governance*. 1(1), 1–11.
- Regency, L., Fitra, A., Rahman, B., Zitri, I., & Mataram, U. M. (2023). *Nusantara Hasana Journal*. 3(2), 144–159.
- Rodríguez, Velastequí, M. (2019). *No Analisis struktur indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah berpusat pada persepsi kesehatan subjektif* Judul. 1–23.
- Suryani, A. I. (2017). Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal. *Jurnal Spasial*, 3(1). <https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595>
- Zitri, I. (2022). Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 85–102. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.436>